KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pimpinan BGN berganti, Komisi IX DPR usul benahi 3 tantangan
Tanggal : Minggu, 07 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pimpinan BGN Berganti

Komisi IX DPR Usul Benahi 3 Tantangan

WAKIL Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Pergantian kepemimpinan di lembaga tersebut menjadi momentum membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini.

"Pergantian Kepala BGN oleh Nanik S. Deyang sebagai figur yang sangat tepat untuk menakhodai BGN," puji Yahya di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN untuk menggantikan Dadan Hindayana yang terjerat kasus dugaan korupsi yang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Nanik sudah punya cukup pengalaman di BGN karena sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala.

"Sehingga kami meyakini beliau sudah cukup waktu untuk memahami seluruh proses atau kegiatan yang berjalan," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Yahya menilai, pengalaman Nanik yang intensif dalam melakukan pengawasan langsung ke berbagai daerah membuatnya sangat memahami seluk-beluk, dinamika, dan hambatan riil yang dihadapi program MBG di lapangan. Namun, tugas berat menanti Kepala BGN yang baru.

Untuk memastikan program prioritas nasional ini berjalan efektif dan berdampak nyata bagi pemenuhan gizi masyarakat, Yahya menyebut ada tiga tantangan utama yang mendesak untuk segera dibenahi. Pertama, perbaikan tata kelola anggaran dan operasional.

"Substansi mendasar yang perlu diperbaiki adalah transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan serta manajemen distribusi," tandas politikus Golkar ini.

Yahya menerangkan, perbaikan tata kelola di BGN sangat dibutuhkan. Dalam hal ini pembenahan akurasi data penerima manfaat dan efisiensi rantai pasok dari pusat hingga ke daerah harus dipastikan bebas dari kebocoran. "Ini penting dilakukan karena MBG menyerap anggaran negara yang sangat besar," tandasnya.

Kedua, penegakan disiplin dan standardisasi ketat. BGN harus memperketat implementasi *Standard Operating Procedure* (SOP) di setiap unit penyedia makanan. Belajar dari beberapa insiden keracunan makanan yang sempat terjadi di lapangan, penegakan disiplin higienitas dan kualitas bahan baku menjadi harga mati demi mencapai target nol kecelakaan kerja/pangan." Pengawasan berkala juga tidak boleh kendor," tegasnya.

Ketiga, memperkuat koordinasi lintas sektor dan pemerintah daerah. Yahya bilang, faktor ini merupakan salah satu titik lemah yang kerap menghambat program skala nasional, yaitu ego sektoral.

Yahya menuntut Kepala BGN yang baru untuk meningkatkan komunikasi sinergis dengan kementerian lembaga terkait. Seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta Pemerintah Daerah (Pemda).

"Sinergi ini sangat krusial, terutama dalam fungsi pengawasan terpadu di lapangan yang selama ini masih longgar," kata legislator asal Jawa Timur (Jatim) ini.

Menurutnya, masyarakat kini menaruh harapan besar kepada BGN di bawah kepemimpinan Nanik S Deyang. Karena itu, lembaga tersebut diharapkan tidak hanya menjadi lembaga administratif, tetapi mampu bertransformasi menjadi motor penggerak perbaikan gizi nasional yang aman, disiplin, dan bebas dari insiden yang merugikan masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menambahkan, evaluasi dalam sistem pemerintahan merupakan hal yang wajar. Langkah ini untuk memastikan setiap program prioritas nasional berjalan lebih baik dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

"Kami apresiasi kepada (mantan Kepala BGN) Dadan Hindayana beserta jajaran wakil kepala badan yang mengakhiri masa tugasnya. Mereka telah memberikan kontribusi penting dalam membangun fondasi kelembagaan BGN sejak awal pembentukannya," puji Nurhadi di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Nurhadi menilai, membangun lembaga baru dengan cakupan program sebesar program MBG bukanlah pekerjaan mudah. Berbagai infrastruktur kelembagaan, sistem pelayanan, dan jaringan pelaksanaan program telah mulai terbentuk selama masa kepemimpinan sebelumnya.

Dengan itu, ia berharap pergantian kepemimpinan harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Terlebih, MBG merupakan investasi strategis bangsa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

"Sehingga pelaksanaannya harus semakin profesional, akuntabel, tepat sasaran, dan berkelanjutan," tandas politikus Nasdem ini.

Menurutnya, pergantian pimpinan di BGN sebagai amanah yang sangat besar mengingat tingginya harapan masyarakat terhadap keberhasilan program prioritas nasional itu. Dengan itu, kepemimpinan baru dapat segera melakukan konsolidasi dan memperkuat pengawasan di seluruh rantai pelaksanaan program. Mulai dari pengadaan bahan pangan, proses produksi, distribusi, hingga kualitas dan keamanan makanan yang diterima penerima manfaat.

Nurhadi juga meminta BGN untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas layanan dibanding sekadar mengejar target kuantitas penerima program. Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dampaknya terhadap perbaikan status gizi anak, penurunan angka stunting, peningkatan kesehatan ibu hamil, dan kualitas generasi masa depan Indonesia.

Selain itu, ia mendorong BGN agar semakin terbuka terhadap masukan dari DPR, Pemda, akademisi, tenaga kesehatan, pelaku usaha pangan, hingga masyarakat sipil. Karena program sebesar MBG membutuhkan kolaborasi yang kuat agar setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.

Komisi IX DPR, kata Nurhadi, akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif untuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan. Yaitu menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, cerdas, dan mampu bersaing di masa depan.

"Kepemimpinan baru di BGN juga dapat membawa semangat perbaikan, memperkuat kepercayaan publik, dan mempercepat terwujudnya visi Indonesia Emas 2045," tutupnya. ■ TIF